

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT
TENTANG PERWALIAN ANAK PENGUNGSI ROHINGYA**



OLEH:

TIRZHA CAROLAINE PRISKA SUOTH, S.H.

NIM. 031914253006

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT
TENTANG PERWALIAN ANAK PENGUNGSI ROHINGYA**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga**

OLEH:

TIRZHA CAROLAINE PRISKA SUOTH, S.H.

NIM. 031914253006

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui Pada tanggal 12 Oktober 2021

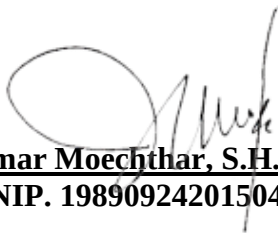
Oleh:

Dosen Pembimbing Ketua,



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Dosen Pembimbing Kedua,



Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

2. Erni Agustin, S.H., LL.M.

3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- ❖ Nama : Tirzha Caroline Priska Suoth
- ❖ N I M : 031914253006
- ❖ Alamat/No. Tlp. : Jalan Sam Ratulangi 26, Kelurahan Tanjung Batu Ling. III No. 8A, Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara 95117 / 082243351025

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 1 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Tirzha Caroline Priska Suoth

NIM. 031914253006

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara peratifikasi *United Nations Convention on The Rights of the Child* (UNCRC) berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak fundamental anak demi kepentingan terbaik anak tanpa adanya diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi atas dasar kewarganegaraan. Disamping itu, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan transit pengungsian selalu menerima pengungsi dari berbagai negara tiap tahunnya, salah satunya adalah pengungsi etnis Rohingya yang dipersekusi oleh rezim militer Republik Myanmar. Namun sayangnya Indonesia tidak meratifikasi *United Nations Convention Relating to The Status of Refugees* 1951 dan *United Nations Convention Relating to The Status of Stateless Person* 1954 yang mengakibatkan pengungsi beserta anaknya tidak dapat mengakses mata pencaharian yang layak dan akses terhadap pendidikan yang menyeluruh layaknya Warga Negara Indonesia. Keadaan tersebut diperparah ketika pengungsi terjebak di Indonesia akibat permintaan suaka mereka yang tidak dikabulkan oleh negara tujuan pengungsian. Penelitian ini membahas kedudukan hukum anak pengungsi Rohingya sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia serta keabsahan dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta wasiat perwalian bagi anak pengungsi Rohingya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penelusuran kepustakaan dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan bahan penelitian dengan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini, *pertama*, Indonesia tidak melaksanakan ketentuan perlindungan Pasal 2 UNCRC yang tetap berlaku terhadap anak-anak pengungsi Rohingya; *kedua*, Hukum Perdata Internasional Indonesia sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum pengungsi yang tidak mempunyai kewarganegaraan, Pasal 18 AB berkedudukan sebagai dasar kewenangan notaris untuk membuat akta perwalian anak pengungsi Rohingya sepanjang adanya pemilihan hukum yang tercantum dalam akta wasiat yang wajib dibuat dalam bentuk wasiat terbuka. Republik Indonesia seyogyanya memperluas dan mewujudkan akses anak pengungsi terhadap pendidikan dan hak-hak fundamental anak lainnya sebagai wujud pemenuhan UNCRC dan segera memperbarui Hukum Perdata Internasional Indonesia agar selaras dengan perkembangan dunia internasional.

Kata kunci: Pengungsi; perwalian; wasiat; hukum perdata internasional

ABSTRACT

Indonesia as a state party of United Nations Convention on The Rights of the Child (UNCRC) is bound to ensure the fulfillment of children's fundamental rights for the best interest of the child without any discrimination, mainly discrimination based on citizenship. Additionally, Indonesia as transit destination for refugees is actively accepting refugees from various countries every year, one of its which is Rohingya refugees who were persecuted by military regime of the Republic of Myanmar. Unfortunately, Indonesia did not ratify the United Nations Convention Relating to The Status of Refugees 1951 and the United Nations Convention Relating to The Status of Stateless Person 1954 which resulting in refugees and their child not being able to access decent livelihoods and access to primary education like Indonesian citizens. The situation is exacerbated when refugees are trapped in Indonesia due to their asylum request which is not granted by asylum country. This research discusses the legal position of Rohingya refugee children as legal subjects in the Indonesia legal system as well as the legitimacy and authority of a notary in making guardianship wills for Rohingya child refugee. The type of this research is legal research with a statutory approach, conceptual approach, and statutory approach. This study uses primary legal material and secondary legal materials with a literature research method by interpreting and constructing research material using deductive method. The conclusion of this research, first, Indonesia did not implement the protection invoked by the Article 2 of the UNCRC which by law applies to Rohingya child refugees; second, Indonesia's International Civil Law is outdated and unable to accommodate growing needs of stateless refugees. Article 18 of Algemene Bepalingen voor Wetgeven (AB) may be used as the basis for notary to make a guardianship deed for Rohingya child refugees if its choice of law is certain and must be made in the form of open will (openbaar testament). Republic of Indonesia should fulfill the child refugees' access to education and other children fundamental rights as the form of its compliance to UNCRC. Indonesia should immediately update its International Civil Law Instrument to accommodate shifting global paradigm.

Keywords: *Refugees; guardianship; testament; international private law*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat, hikmat dan perkenanan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG PERWALIAN ANAK PENGUNGSI ROHINGYA”**.

Dalam penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang penulis temui, namun berkat kerja keras dan bantuan serta dukungan baik secara materiil dan moril yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Tesis ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan tertinggi kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Letkol Laut Franky F. D. Suoth, S.H., M.H. dan Ir. Evangelina J. L. Untung, S.T, M.T., yang tak putus-putusnya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan penuh kepada penulis;
2. Oma tercinta, Ibu Pdt. Judith Santje Tingkai, B.Th., yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti untuk penulis;
3. Kakak dan adik penulis, Putrabahari T. A. Suoth dan Farrel O. P. Suoth, serta seluruh sanak saudara, yang selalu memberikan dukungan, bahkan yang senantiasa mendoakan keberhasilan penulis;
4. Reinaldy Putra Polimpung, S.H., yang senantiasa memberikan *support* dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
5. Daniel Kolondam, S.H., Julio Aipassa S.H., Grace Leasiwal S.T., dan teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang

selalu mendukung penulis sampai dengan saat ini;

6. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III;
7. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Airlangga, juga selaku Dosen Pembimbing I Penulis, dan Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Airlangga, juga selaku Dosen Pembimbing II Penulis. Penulis sangat berterima kasih atas semua bimbingan, kesabaran dan bantuan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Tesis ini;
8. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Wali penulis, yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung;
9. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Dr. Koesrianti, S.H., LL.M, dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal dan dalam Ujian Tesis penulis, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan ujian Tesis dengan baik dan lancar;
10. Seluruh dosen dan staf pegawai Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang ikut membantu memperlancar proses perkuliahan sampai dengan proses pengurusan Tesis

penulis;

11. Seluruh pihak yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu penulis, demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, sangat besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis secara pribadi, maupun bagi seluruh pihak yang telah menyempatkan diri untuk membaca Tesis ini.

Manado, 13 Desember 2021

Penulis,



Tirzha Carolaine Priska Suoth, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisa bahan hukum	11
1.6 Sistematika Penulisan	11

BAB II KEDUDUKAN HUKUM ANAK PENGUNGSI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	14
2.1 Pengertian Anak Pengungsi dalam Sistem Hukum Indonesia	14
2.2 Kedudukan Hukum Anak Pengungsi Rohingnya sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	31
BAB III KEABSAHAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT PERWALIAN BAGI ANAK PENGUNGSI	46
3.1 Keabsahan Pembuatan Akta Wasiat Perwalian bagi Anak Pengungsi oleh Notaris	46
3.2 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Wasiat Perwalian bagi Anak Pengungsi	67
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2. Saran	83
DAFTAR BACAAN	85

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara 4235) sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5126);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339)